

## PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BALI

Nyoman Ayu Tria Pramesti<sup>1</sup>  
I K. G Bendesa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana  
<sup>1</sup>email: [ayutriapramesti@gmail.com](mailto:ayutriapramesti@gmail.com)/ telp: +6281558035021

### ABSTRAK

Salah satu faktor yang menyebabkan ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu negara adalah tingginya angka kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Obyek penelitian ini meliputi angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran terhadap kemiskinan. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi non partisipan. Sumber data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2000-2016. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yaitu untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan Angka Harapan Hidup, Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Secara parsial Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali, sedangkan variabel Angka Harapan Hidup dan Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.

**Kata Kunci:** *Angka Harapan Hidup, Pendidikan, Pendapatan Perkapita, Pengangguran dan Kemiskinan.*

### ABSTRACT

*One of the factors causing lagging and obstacles in the development of a country is the high poverty rate. This research was conducted in Bali Province. The objects of this study include life expectancy, education, income per capita and unemployment to poverty. Data collection method used in this research is non participant observation. The source of this research data comes from secondary data. This data collection is done through observation of Bali Provincial Statistics Bureau. This research aims to know partially and simultaneously influence of life expectancy, education, income per capita and unemployment to poverty in Bali Province year 2000-2016. Analyzer used is doubled linear regression that is to measure influence of independent variable to dependent variable. The results of the analysis show that simultaneously Life Expectancy, Education, Income Per Capita and Unemployment have significant effect to Poverty in Bali Province. Partially Education has a negative and significant influence on poverty in Bali Province. Unemployment has a positive and significant impact on Poverty in Bali Province, while Life Expectancy and Income Per Capita variables have positive and insignificant effect on Poverty in Bali Province.*

**Keywords:** *Life Expectancy, Education, Per Capita Income, Unemployment and Poverty.*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan (Vincent, 2009). Salah satu faktor yang menyebabkan ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu negara adalah tingginya angka kemiskinan (Kuncoro, 2005). Permasalahan kemiskinan menjadi hal yang paling menarik untuk dikaji dan menjadi hal yang paling penting dan paling mudah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan di suatu negara (Dewi, 2011).

Kemiskinan merupakan konsep multidimensi tentang kesejahteraan manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran misalnya pendapatan, kesehatan, dan keamanan. Disisi lain jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketidakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000. PBB mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggotanya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan dimasing-masing negara hingga 50 persen pada tahun 2015 (Yogi dan Jember, 2010).

Provinsi Bali sebagai salah satu Provinsi di Indonesia juga tidak lepas dari persoalan kemiskinan. Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang perkembangan perekonomiannya sangat pesat. Namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi (Alit dan Sudiana, 2013). Provinsi Bali memiliki struktur perekonomian yang begitu

unik dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Keunikan ini karena sebagian sumber penghidupan masyarakat bersumber dari sektor tersier (pariwisata) sedangkan sektor lainnya berperan sebagai sektor pendukung. Sebagai salah satu provinsi yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, Provinsi Bali tidak terlepas dari masalah kemiskinan (BPS Provinsi Bali, 2013:491).

**Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2000-2016 (Persen)**



*Sumber:* BPS Provinsi Bali, 2017

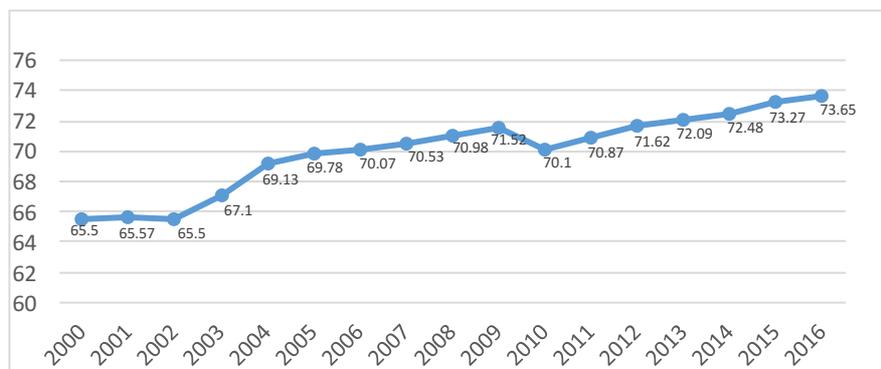
Gambar 1 memperlihatkan persentase penduduk miskin di Bali dari tahun 2000-2016 yang mengalami fluktuasi, dari data tersebut persentase penduduk miskin tertinggi berada pada tahun 2001 yaitu 7.87 persen, dimana pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Provinsi Bali terendah terdapat pada tahun 2013. Tantangan yang harus dihadapi adalah lambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi ini, terutama di perdesaan. Tingginya persentase penduduk miskin khususnya di perdesaan menunjukkan kegiatan perekonomian yang stagnan, terutama di sektor pertanian (Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bali, 2015)

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, yaitu faktor sosial dan faktor ekonomi. Dimana faktor sosial dalam penelitian ini dilihat dari angka

harapan hidup, pendidikan dan pengangguran sedangkan faktor ekonomi dapat dilihat dari pendapatan perkapita.

Salah satu strategi atau upaya pengentasan kemiskinan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial yang merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Subandi, 2012). Dengan demikian, pembangunan masyarakat atau penduduk menjadi sarana untuk menggapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Untuk dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakanlah suatu indikator komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Finkayana, 2016).

**Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2000-2016**

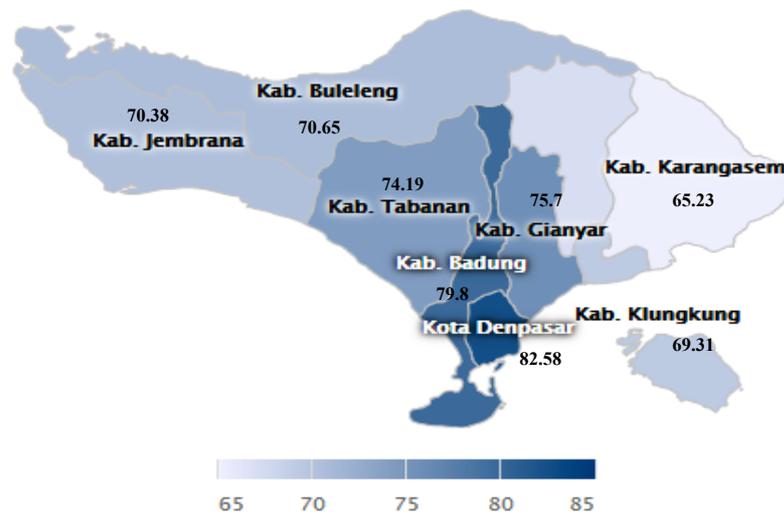


*Sumber:* BPS Provinsi Bali, 2017 (Tahun dasar 2000 dan 2010)

Indeks pembangunan manusia merupakan sebuah indeks komposit dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang tercemin dengan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketerampilan, serta mempunyai pendapatan yang

memungkinkan untuk dapat hidup layak. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2010 diukur menggunakan metode baru yang terdiri dari beberapa indikator untuk mengukurnya, seperti angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran (BPS, 2013). Berdasarkan gambar 2 menunjukkan IPM di Provinsi Bali dari tahun 2000-2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga tahun 2016 IPM Provinsi Bali telah mencapai 73.65 persen angka ini meningkat sebesar 0.38 poin dibandingkan IPM tahun 2015 yang sebesar 73.27 persen.

**Gambar 3 Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016**

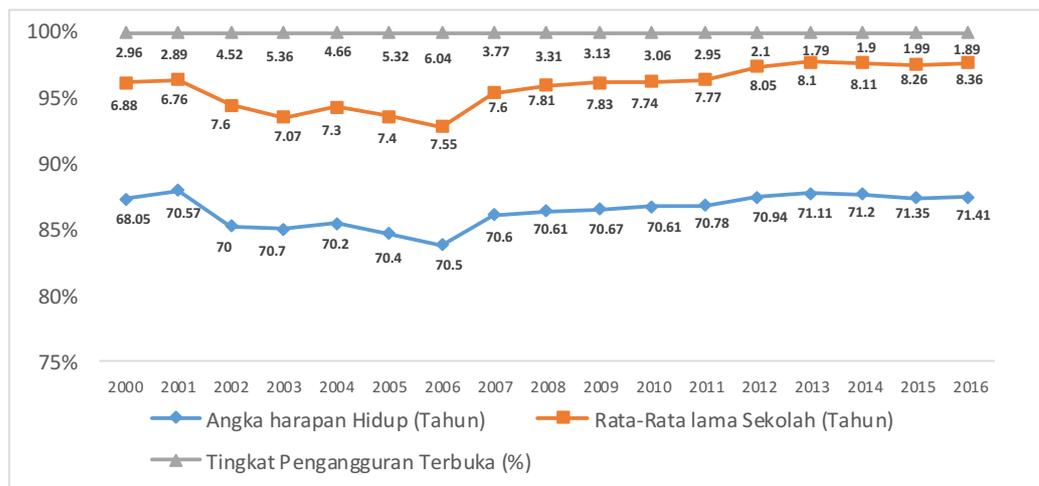


*Sumber:* ipm.bps.go.id, 2016

Gambar 3 diatas merupakan gambar peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2016, dimana peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi menjadi milik Kota Denpasar yang mencapai 82.58. Pembangunan Manusia di Provinsi Bali dapat dikatakan masih berjalan pada level kecepatan yang sama. Hal ini terbukti dengan peringkat IPM yang tidak bergeser selama lima tahun terakhir. Kabupaten Karangasem masih memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah yang mencapai 65.23 yang terpaut cukup jauh

jika dibandingkan dengan Kota Denpasar. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2010 diukur menggunakan metode baru yang terdiri dari beberapa indikator untuk mengukurnya, seperti angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran (BPS, 2013).

**Gambar 4 Angka Harapan Hidup, Rata – Rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2000-2016**



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2017

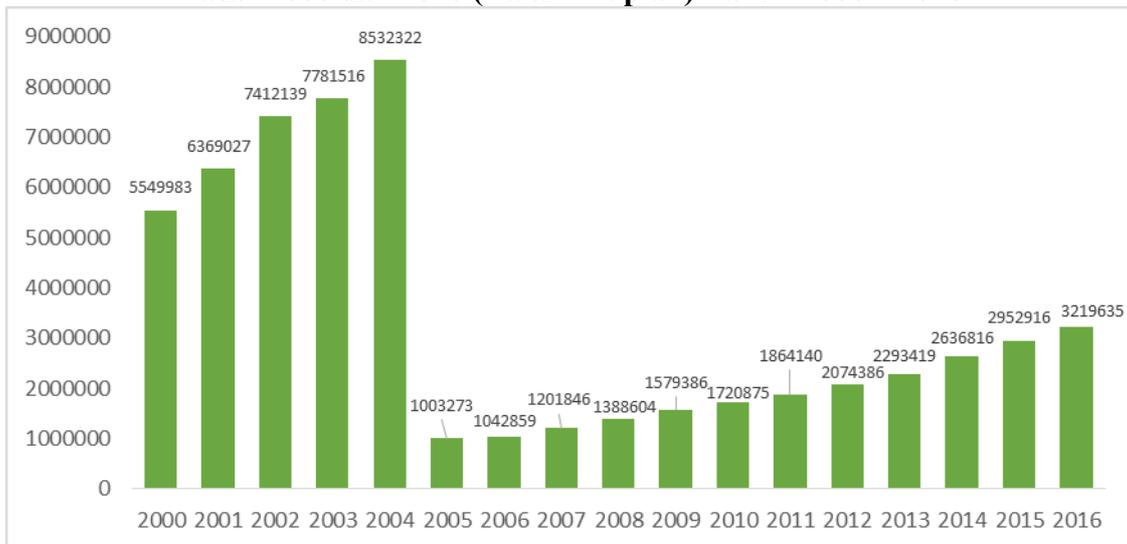
Pembangunan manusia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Seseorang yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah (Wiguna, 2013). Kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka dikategorikan

miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang pada umumnya tidak memadai (Rahmawati, 2017).

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang perkembangan perekonomiannya pesat. Namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi. Permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian ekstra. Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya di pandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser. Dalam arti yang luas kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi tidak sebatas pada belum dapat memenuhi kebutuhan dasar namun juga secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Alit dan Sudiana, 2013).

Menurut Todaro (2000) kemiskinan merupakan rendahnya pendapatan perkapita dan lebarnya kesenjangan distribusi pendapatan, dimana penduduk ini pada umumnya bertempat tinggal di daerah – daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok dibidang pertanian, dan kegiatan – kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional. Menurut Kuncoro (2004) pendapatan perkapita merupakan indikator untuk melihat daya beli suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai jumlah dari nilai suatu barang dan jasa rata – rata yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu. Besarnya pendapatan perkapita sering digunakan sebagai pembanding tingkat kemakmuran di berbagai daerah (Norton, 2002).

**Gambar 5 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku Provinsi Bali Tahun Dasar 2000 dan 2010 (Dalam Rupiah) Tahun 2000 – 2016**



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2017

Gambar 1.5 menggambarkan pendapatan per kapita dari tahun 2000-2016. PDRB perkapita daerah merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk disuatu daerah, dimana jika semakin besar PDRB perkapitanya maka dapat diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka dapat diartikan semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Hariyadi, 2015). Semakin tinggi pendapatan perkapita yang diterima, semakin tinggi daya beli penduduk, dan kemampuan yang bertambah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerataannya semakin membaik dan dapat mengurangi kemiskinan serta kesulitan – kesulitan lain dalam masyarakat (Iswara, 2014).

- 1) Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan antara lain : 1) Bagaimana pengaruh angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali?

2) Bagaimana pengaruh angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Bali?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, antara lain : 1) Untuk menganalisis pengaruh angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

### **Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku dimasyarakat karena sebab natural, kultural dan struktural (Nugroho, 2004:165). Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas ke dimensi sosial, pendidikan, kesehatan dan politik (Kembar, 2013). Investasi akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum miskin (Yusuf dan Summer, 2015). Menurut Debraj Ray (1998:37) garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan (Dariwardani, 2014).

Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (Kembar, 2013). Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan, salah satu upaya yang efektif yaitu dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Silva dan Sumarto, 2014). Negara miskin yang secara langsung menghadapi masalah kronis ini akan memandang kemiskinan sebagai benih pesimis jangka panjang yang tidak mungkin di hapuskan dalam beberapa generasi (Suhartini, 2014). Kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilan yang pada gilirannya mengurangi potensi untuk berkontribusi bagi perekonomian (Nilsen, 2007).

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2005).

#### 1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah - daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

**Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung. Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan Angka

Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun standar UNDP (Finkayana, 2016).

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator atau penilaian derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Angka Harapan Hidup disebut juga lama hidup manusia didunia. Angka harapan hidup pada suatu umur tertentu didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut dalam situasi kematian yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah (Ayuni, 2013).

### **Pendidikan**

Menurut Sirilius (2017) pendidikan adalah cara yang tepat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan ini dapat dilihat melalui Indikator rata – rata lama sekolah yang mengindikasikan tingginya tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata – rata lama sekolah menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka secara umum semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Tobing (dalam Atmanti, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Menurut Sirilius

(2017) pendidikan adalah cara yang tepat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Ely (2013) pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang, dimana melalui pendidikan seseorang memperoleh banyak pengetahuan, ilmu dan informasi yang terus berkembang. Kualitas sumber daya merupakan faktor dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi (Marielle, 2010).

### **Pendapatan Perkapita**

Menurut Mubyarto (dalam Oktavia, 2008), pendapatan pada dasarnya merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkan. Pendapatan seseorang tergantung dari pekerjaan di bidang jasa atau produksi serta waktu jam kerja, tingkat pendapatan per jam yang diterima serta jenis pekerjaan yang dilakukan dan dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan, tanah, modal dan teknologi. Pendapatan perkapita merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan *standard of living*. Negara yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi umumnya memiliki *standard of living* yang juga tinggi. Sumber pertumbuhan ekonomi dapat terdiri dari kenaikan kualitas dan jumlah tenaga kerja, penambahan modal melalui investasi, serta adanya penyempurnaan teknologi (Pratomo, 2017). Sebuah rumah tangga diidentifikasi sebagai miskin kronis jika pendapatan berada di bawah garis kemiskinan (Radhakrishna, 2007). Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan kualitas hidup negara kaya (dicerminkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi) memiliki kualitas hidup yang lebih baik (dicerminkan oleh, antara lain, angka harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan) dibandingkan dengan Negara miskin (Oktavia, 2008).

## **Pengangguran**

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis. Tidak mengejutkan bahwa pengangguran adalah topik perdebatan politik yang sering dibicarakan dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2012). Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif untuk mencari pekerjaan (John, 2012). Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Stephen, 2014). Menurut Sukirno (2008), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

## **Hubungan antara Angka Harapan Hidup dengan Kemiskinan**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi. Angka harapan hidup meningkat mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan yang baik dari sarana maupun pelayanan kesehatan (Anggadini, 2015). Menurut Finkayana (2016) angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan

alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan angka kesehatan pada khususnya.

### **Hubungan antara Pendidikan dengan Kemiskinan**

Pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang kesuksesan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menunjang tingkat kemakmuran masyarakat dan akan dapat menekan angka kemiskinan Mankiw (2012). Pendidikan sangat diperlukan bagi menunjang keberhasilan Michael (2007). Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herry Faizal (2013) dikatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kalimantan barat. Melalui pendidikan yang memadai, penduduk miskin akan mendapat kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari status miskin di masa depan (Anderson, 2012).

### **Hubungan antara Pendapatan Perkapita dengan Kemiskinan**

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2006). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadlillah (2016) menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh Negara yang sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari masalah ini.

Analisis yang dilakukan oleh Resosudarmo, *et al* (2006), menegaskan bahwa kesenjangan dalam pendapatan per kapita provinsi di Indonesia relatif pasrah, hal ini didasari oleh fenomena, bahwa meskipun pertumbuhan PDB provinsi bervariasi dari

waktu ke waktu adanya provinsi terkaya di antara provinsi lainnya di Indonesia. Tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.

### **Hubungan antara Pengangguran dengan Kemiskinan**

Tingkat pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas besarnya penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Kadangkala ada juga pekerja dipertanian yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan – pekerjaan yang mereka rasa lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber – sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang – orang seperti ini bisa disebut menganggur (Wiguna, 2013).

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Astriani dan Purbadharmaja (2013) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang artinya semakin tinggi tingkat pengangguran maka kemiskinan akan meningkat. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun (Ashcroft dan David, 2008).

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan yang berjenis kausalitas dengan lokasi di Provinsi Bali. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah data angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita, pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bali.

Sampel data angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita, pengangguran dan kemiskinan tahun 2000-2006. Penelitian ini dilakukan dengan metode *time series* selama 17 tahun.

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh angka harapan hidup ( $X_1$ ), pendidikan ( $X_2$ ), pendapatan perkapita ( $X_3$ ) dan pengangguran ( $X_4$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ ) digunakan analisis regresi linier berganda. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda adalah (Nata Wirawan, 2002):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu_i \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Kemiskinan
- $\alpha$  = Nilai Konstan
- $X_1$  = Angka Harapan Hidup
- $X_2$  = Pendidikan
- $X_3$  = Pendapatan Perkapita
- $X_4$  = Pengangguran
- $\beta_1$  = Koefisien regresi dari Angka Harapan Hidup ( $X_1$ )
- $\beta_2$  = Koefisien regresi dari Pendidikan ( $X_2$ )
- $\beta_3$  = Koefisien regresi dari Pendapatan Perkapita ( $X_3$ )
- $\beta_4$  = Koefisien regresi dari Pengangguran ( $X_4$ )
- $\mu_i$  = eror

**PEMBAHASAN**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan hasil olah data melalui bantuan program SPSS, maka dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut :

Y	=	-17,260	+ 0,469 $X_1$	+ -1,896 $X_2$	+ 0,194 $X_3$	+ 0,461 $X_4$
Sb	=	(0,271)	(-0,676)	(0,108)	(0,443)	
t	=	(1,455)	(-2,751)	(0,675)	(2,483)	
Sig. t	=	(0,171)	(0,018)	(0,513)	(0,029)	
F	=	11,302				

Sig.F = 0,000

R<sup>2</sup> = 0,790

Keterangan :

Y = Kemiskinan

X<sub>1</sub> = Angka Harapan Hidup

X<sub>2</sub> = Pendidikan

X<sub>3</sub> = Pendapatan Perkapita

X<sub>4</sub> = Pengangguran

### Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui estimasi regresi yang dilakukan bebas dari adanya gejala multikolinearitas, heterokedastisitas dan data yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebasnya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas residual secara statistik menggunakan *modification of kolmogorov test*. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Residual dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed) > level of significant* ( $\alpha = 5$  persen).

**Tabel 1 Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	17
Kolmogorov-Smirnov Z	0,545
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,928

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,928. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed) > level of significant ( $\alpha = 5\%$ )*. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa residual telah berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah ada korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat diantara variabel bebas. Apabila *variance inflation factor (VIF)* lebih kecil dari pada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
Angka Harapan Hidup	0,504	1,984
Pendidikan	0,290	3,452
LN_X3	0,678	1,475
Pengangguran	0,209	4,789

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *variance inflation factor (VIF)* untuk variabel angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita, dan pengangguran lebih kecil dari pada 10 dan nilai toleran lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

### 3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi tujuan untuk menguji apakah dalam dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul dari observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (Ghozali, 2006: 95). Penentuan ada tidaknya kasus autokorelasi didasari oleh kaidah tersebut di bawah ini.

$0 < d < dl$  = Ada autokorelasi positif

$dl \leq d \leq du$  = Tidak ada autokorelasi positif

$4 - dl < d < 4$  = Ada autokorelasi negatif

$4 - du \leq d \leq 4 - dl$  = Tidak ada autokorelasi negatif

$du < d < 4 - du$  = Tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

**Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,889	0,790	0,720	0,68928	1,242

Sumber: Lampiran 5

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,242 berdasarkan nilai signifikansi 0,05 dengan N=17 dan jumlah variabel independen 4 (K=4), maka diperoleh nilai DU sebesar 1,90 dan DL sebesar 7,08. Oleh karena nilai DL sebesar 7,08 lebih kecil dari DW sebesar 1,242 dan lebih besar dari DU yaitu 1,90 artinya tidak terjadi gejala autokorelasi antara variabel bebas.

### 4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah

satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan uji *Glejser* yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (nilai absolut residual), maka tidak ada heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

**Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.
Angka Harapan Hidup	0,961
Pendidikan	0,644
LN_X3	0,768
Pengangguran	0,547

*Sumber* : Lampiran 6

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas untuk keseluruhan variabel bebas memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 dimana nilai Sig. untuk angka harapan hidup sebesar 0,961 untuk pendidikan sebesar 0,644 untuk pendapatan perkapita sebesar 0,768 dan untuk pengangguran sebesar 0,547. Dengan demikian dapat diaktakan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## **Pengujian Hipotesis**

### **1. Uji Simultan**

Uji F menunjukkan  $F_{hitung} (11,302) > F_{tabel} (3,26)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini berarti angka harapan hidup ( $X_1$ ), pendidikan ( $X_2$ ), pendapatan perkapita ( $X_3$ ), dan pengangguran ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y) Provinsi Bali tahun 2000-2016. Koefisien

determinasi atau  $R^2 = 0,790$  mempunyai arti bahwa 79 persen kemiskinan Provinsi Bali dipengaruhi oleh angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran, sedangkan sisanya 21 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model tersebut.

## 2. Uji Parsial

### 1) Uji t untuk Variabel Angka Harapan Hidup ( $X_1$ ) terhadap Kemiskinan (Y)

Uji t menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} (1,455) < t_{tabel} (1,782)$  atau  $sig\ 0,171 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang artinya angka harapan hidup ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y) di Provinsi Bali tahun 2000-2016. Nilai  $\beta_1$  sebesar 0,469 yang berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y).

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Finkayana (2016) yang menyatakan bahwa angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Ketidaksignifikansinya angka harapan hidup terhadap kemiskinan ini karena seseorang yang termasuk dalam usia kerja, memiliki kesehatan yang baik dan pendidikan yang tinggi masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan dikarenakan kurang memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, sehingga orang tersebut tidak memiliki pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan jumlah penduduk miskin, ini yang menyebabkan angka harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

## 2) Uji t untuk Variabel Pendidikan ( $X_2$ ) terhadap Kemiskinan (Y)

Uji t menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} (-2,751) > -t_{tabel} (-1,782)$  atau  $sig\ 0,018 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya pendidikan ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y) Provinsi Bali tahun 2000-2016. Nilai  $\beta_2$  sebesar -1,896 yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y) yang memiliki arti bahwa setiap kenaikan pendidikan sebesar satu persen akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 1,896. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2006), kondisi kemiskinan dapat juga di sebabkan karena pendidikan yang rendah. Dimana taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Menurut Abrisham Aref (2011), pendidikan secara luas diakui sebagai proses untuk pengentasan kemiskinan.

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Sadoulet dalam Kokila (2000) yang menyatakan bahwa pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak anak mereka. Secara tidak langsung, pendidikan memberikan kemampuan yang lebih bagi golongan miskin untuk memperoleh bagian mereka dari total pendapatan.

### **3) Uji t untuk Variabel Pendapatan Perkapita ( $X_3$ ) terhadap Kemiskinan (Y)**

Uji t menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}(0,675) < t_{tabel}(1,782)$  atau  $sig\ 0,513 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang artinya pendapatan perkapita ( $X_3$ ) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y) di Provinsi Bali tahun 2000-2016.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Chandra (2010) yang menyatakan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan tidak hanya berhubungan dengan aspek kemampuan pendapatan, tetapi berkaitan juga dengan pemerataan pendapatan masyarakat disuatu daerah (Sukirno, 2008). Ketidaksignifikansinya pendapatan perkapita terhadap kemiskinan salah satunya disebabkan karena ketimpangan pendapatan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat yang mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan. Selain itu kondisi perekonomian pada penelitian jurnal tidak sama dengan kondisi perekonomian saat ini dikarenakan adanya tahun dasar yang berbeda yaitu tahun dasar 2000 dengan tahun dasar 2010, hal ini yang menyebabkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

### **4) Uji t untuk Variabel Pengangguran ( $X_4$ ) terhadap Kemiskinan (Y)**

Uji t menunjukkan bahwa Oleh karena  $t_{hitung}(2,483) > t_{tabel}(1,782)$  atau nilai  $sig\ 0,029 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Ini berarti bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kemiskinan Provinsi Bali

tahun 2000-2016. Nilai  $\beta_4$  sebesar 0,461 yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran menunjukkan tanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori lingkaran setan kemiskinan versi nurkse yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai rendahnya produktivitas seseorang. Hal itu dikarenakan penganggur tidak melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan upah yang nantinya digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin banyak pengangguran maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan terus bertambah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Algis Sileika (2013) mengatakan bahwa pengangguran secara langsung dipengaruhi oleh kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah terbesar yang dihadapi sebagian besar negara di dunia saat ini, apakah mereka Negara maju atau berkembang. Mereka hambatan untuk kemajuan sosial, dan menyebabkan pemborosan sumber daya manusia dan material (Akwara, Azalahu F, 2013). Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Astriani dan Purbadharmaja (2013) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang artinya semakin tinggi tingkat pengangguran maka kemiskinan akan meningkat.

## **SIMPULAN**

1. Angka Harapan Hidup, Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2000-2016. Nilai  $R^2$  sebesar 0,790

berarti 79% variasi naik turunnya kemiskinan dipengaruhi oleh variasi faktor Angka Harapan Hidup, Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Pengangguran. Sisanya sebesar 21% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian.

2. (1) Angka Harapan Hidup secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2000-2016 (2) Pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2000-2016. (3) Secara parsial pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2000-2016. (4) Pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2000-2016.
3. Baik angka harapan hidup dan pendapatan perkapita berbasis pada pendidikan formal tidak spesifik berkontribusi terhadap pendapatan perkapita dan angka harapan hidup penduduk miskin di Provinsi Bali, ketika penduduk usia produktif hanya berfokus hanya pada pendidikan formal yang telah ditempuh, maka hal tersebut belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai pegangan dalam memasuki dunia kerja. Saat ini tenaga kerja yang dibutuhkan dan dicari selain yang telah menempuh pendidikan formal juga dibutuhkan keahlian dan keterampilan yang memadai, apabila hanya berfokus pada pendidikan formal dan tidak memiliki keterampilan yang memadai akan menyebabkan tidak semua penduduk tersebut dapat terserap pada lapangan pekerjaan sehingga mereka tidak memiliki

pendapatan yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bali.

## **SARAN**

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini seperti variabel distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk variabel angka harapan hidup yang tidak signifikan sebaiknya pemerintah memberikan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki bagi penduduk usia produktif agar kedepannya mereka dapat membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan penghasilan sehingga menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Sedangkan untuk variabel pendapatan perkapita yang tidak signifikan, sebaiknya pemerintah lebih memfokuskan pemerataan pembangunan yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat yang berorientasi pada pemerataan pendapatan masyarakat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.

## **Daftar Pustaka**

- Abrisham Aref. 2011. Perceived Impact of Education on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran. *Life Science Jurnal*. 8(2), h:198-199.
- Alcock, Pete. 2012. *Poverty and Social Exclusion. The Student's Companion to Social Policy. Fourth Edition*, pp: 26-186.
- Alit Wiradyatmika A.A Gde dan Sudiana. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.

- Anderson, Courtney Lauren. 2012. Opening Doors: Preventing Youth Homelessness Through Housing and Education Collaboration. *Seattle Journal for Social Justice*, 11(2).
- Anggadini, Fima. 2015. Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 – 2013. *e-Jurnal Katalogis* Vol.3 No.7.
- Akwara Azalahu F dan Akwara Ngozi F. 2013. Unemployment and Poverty: Implications for National Security and Good Governance in Nigeria. *International Journal of Public Administration and Management Research (IIPAMR)*. 2(1), h:2-3
- Algis Sileika dan Jurgita Bakeryte. 2013. Theoretical Issues of Relationship Between Unemployment Poverty and Crime in Sustainable Development. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 2(3), h: 64-65.
- Ashcroft, Vincent & David Cavanough. 2008. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(3), pp: 335-363.
- Astrini, Myanti dan IB Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Atmanti, Hastarini Dwi. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2 (1), 30-39.
- Ayuni, Ni Wayan Dewinta. 2013. Pemodelan Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 dan 2011 Berdasarkan Angka Melek Huruf, Rata – rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita. Jurusan Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. *Jurnal Matematika* Vol. 3 No.1.
- BPS Provinsi Bali. 2013. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota. Bali: BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2017. Bali Dalam Angka 2016. Denpasar.
- Capra, Theresa. 2009, Poverty and its Impact on Education: Today and Tomorrow. *The New Higher Education Journal*
- Chandra, A. 2010. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2010. *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi* Vol. 20 No.2.

- Dariwardani, Ni Made Inna. 2014. Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) Di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 – 2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], may 2014. ISSN 2303-0186.
- Dewi, Surya. 2011. Kovergensi Perekonomian di Bali *Inequality* Sebagai Penyebab Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Sosial Input*, Vol.7 No.2.
- Debraj Ray (1998): *Development Economics*, Princeton University Press. Chapters 16, 17 and 18.
- Ely, Kusuma, Retno. (2013). Pengaruh Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya*.Vol.1. No.3.
- Fadlillah Nurul, Sukiman dan Agustin. 2016. Analisis Penagruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Eko-Regional*, Vol.11, No.1.
- Finkayana, I Putu Arya dan Heny Urmila. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 5 No. 7.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyadi, Eko. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan perkapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Herry, Faisal. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Terhadap Produktifitas Dan Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Kalimantan Barat. *Tesis*. Program Magister Ilmu Ekonomi. Universitas Tanjung Putra.
- Iswara, I Made Anom dan Indrajaya, I Gusti Bagus. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 11
- John, O. Aiyedogbon. 2012. Poverty and Youth Unemployment in Nigeria, 1987-2011. *International Journal of Business and Social Science*.
- Kembar Sri Budhi, Made. 2013. Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 6 No. 1.
- Kokila P, Doshi. 2000. *Inequality and Economic Growth*, University of San Diego.

Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi.....[Nyoman Ayu Tria Pramesti, I K. G Bendesa]

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta. Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mankiw, Gregory. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Marielle, Monteils.2010. *The Analysis Of The Relation Between Education And Economic Growth*. Journal Of Comparativeand International Education. Vol.34. No.1.
- Michael, Sanderson. 2007. *Educational and Economic History: The Good Neighbours*". *Journal of the History of Education Society*. Vol.36 No.4-5. Pp 429-445.
- Nilsen, R. Sigurd. 2007. *Poverty in America: Consequences For Individuals and The Economy*. Paper Presented for United States Government Accountability Office. Amerika Serikat: GAO.
- Nugroho, Iwan. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Norton, Seth W. 2002. Economic Growth and Poverty: In Search of Trickle Down. *Cato Journal*, 22(2), pp:263-275.
- Oktavia, Putu. 2008. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Perkapita*.
- Pratomo, Devanto Shasta. Pendidikan Dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Indonesia: Analisis Terhadap Hipotesis Kurva-U. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], may 2017. ISSN 2303-0186.
- Radhakrishna, R at all. 2007. *Estimation and Determination of Chronic Poverty In India: An Alternative Approach*. *Chronic Poverty Journal*.
- Rahmawati. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, *Skripsi* Program Studi Pertanian dan Sumberdaya, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.
- Rahmawati, Kurnia Dwi. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Resosudarmo, BP., Vidyattama, Y., (2006). Regional Income Disparity in Indonesia. A Panel Data Analysis. *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 23 No. 1, April 2006. Pp 31-44.
- Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bali 2015.

- Silva, Indunil De and Sudarno Sumarto. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50 (2):227-42.
- Sirilius, Seran. 2017. *Hubungan Antara Pendidikan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Universitas Timor. Vol.10. No.2.
- Stephen, Faraz Hayat. 2014. Employment, and underemployment in Africa. *Journal World Institute for Development Economis*.
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, Atik Mar'atis; Yuta, Ropika. 2014. Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Serta Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.L.], Nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Teori Pengantar Makroekonomi edisi 3*. PT.Raja grafindo persada. Jakarta
- Suryawati. 2005. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta.
- Suyana Utama, Made. (2007). *Buku ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. (Terj). Haris Munandar. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Verner, Dorte. 2006. *Rural Poor in Rich Rural Areas: Poverty in Rural Argentina*. *World Bank Policy Research Working Paper 4096*.
- Vincent, Brian. 2009. *The Concept'Poverty towards Understanding in The Context of Development*. 2(2).
- Wiguna, Van Indra. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Yogi Swara dan Jember, Made. 2010. Kemiskinan di Bali, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Denpasar.
- Yusuf, Arief Anshory & Andy Summer. 2015. Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (3):323-48.